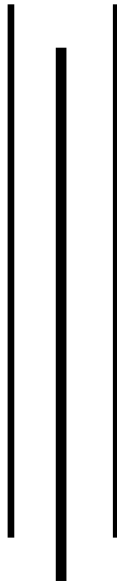




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

**RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2025**



**BIRO ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KATA PENGANTAR

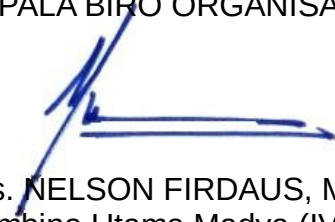
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Dokumen Renja ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan Biro Organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran.

Penyusunan Renja ini mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan. Kami menyadari bahwa Biro Organisasi memegang peran krusial dalam perumusan kebijakan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan efektivitas kinerja instansi. Oleh karena itu, Renja ini dirancang untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang kami laksanakan selaras dengan visi dan misi organisasi, serta berkontribusi nyata pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi aktif dalam proses penyusunan Renja ini, mulai dari tim internal Biro Organisasi, unit kerja terkait, hingga para pihak yang memberikan masukan dan saran konstruktif. Dukungan dan kerja sama yang baik menjadi kunci keberhasilan kami dalam merumuskan rencana yang komprehensif, terukur, dan akuntabel.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu, kami sangat terbuka terhadap masukan dan kritik yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Renja ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam mewujudkan Sumsel Maju Terus untuk Semua dan Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Palembang,
KEPALA BIRO ORGANISASI,



Drs. NELSON FIRDAUS, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196710161988101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAULUAN.....	1
1.1 Latar Bekalang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	6
2.2 Analisa Perangkat Daerah.....	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.....	8
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	9
BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	10
3.1 Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan.....	10
3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional.....	11
3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	13
3.4 Program dan Kegiatan.....	15
BAB IV PENUTUP.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 ini disusun sebagai pedoman utama bagi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan program dan kegiatan sepanjang tahun anggaran 2025. Penyusunan Renja ini merupakan bagian tak terpisahkan dari siklus perencanaan pembangunan yang lebih luas, selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah khususnya Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan. Proses ini vital untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan visi, misi, dan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Kebutuhan akan Renja yang terstruktur dan terukur semakin mendesak mengingat dinamika lingkungan strategis yang terus berubah. Faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi global, perubahan kebijakan nasional, serta tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, menuntut adanya respons yang cepat, adaptif, dan terarah. Tanpa Renja yang jelas, potensi disorientasi dan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya akan sangat besar. Oleh karena itu, Renja 2025 dirancang untuk menjadi instrumen navigasi yang memandu seluruh unit kerja menuju pencapaian target-target yang realistis dan berdampak.

Penyusunan Renja 2025 juga berlandaskan pada evaluasi kinerja tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini menjadi bahan refleksi untuk mengidentifikasi keberhasilan yang perlu dipertahankan dan area-area yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan evaluasi tersebut, Renja 2025 memuat berbagai inovasi dan perbaikan program untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi sebelumnya, sekaligus mengoptimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, Renja ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan sebuah komitmen kolektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Singkatnya, Renja Tahun 2025 ini adalah wujud konkret dari perencanaan yang matang dan berorientasi hasil. Dokumen ini menjadi jembatan antara ide

dan eksekusi, memastikan setiap sumber daya—baik finansial, manusia, maupun teknis—dialokasikan secara optimal untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2025 berpedoman pada peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 – 2026, sebagai acuan.
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang menjadi acuan utama dalam penyelarasan tujuan dan sasaran Renstra Biro Hukum dan HAM.
8. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang menetapkan fungsi strategis Biro Hukum dan HAM dalam mendukung pelaksanaan tugas gubernur sebagai kepala daerah.

Selain itu, penyusunan Renja 2025 juga mengacu pada peraturan teknis yang lebih spesifik, seperti **Surat Edaran Kepala Daerah** dan **Peraturan Kepala Daerah** yang mengatur petunjuk teknis penyusunan Renja. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa Renja disusun sesuai dengan dinamika dan prioritas pembangunan yang berlaku di daerah. Dengan demikian, dokumen Renja 2025 ini disusun secara sistematis, terukur, dan memiliki **kekuatan hukum** yang kuat sebagai landasan pelaksanaan program pembangunan.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 merupakan langkah strategis yang didesain untuk memastikan setiap program dan kegiatan yang dijalankan selaras dengan tujuan strategis daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai peta jalan yang akan mengarahkan seluruh unit kerja di bawah Biro Organisasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Secara fundamental, Renja ini dimaksudkan untuk:

1. Menerjemahkan Visi, Misi, dan Tujuan Strategis. Renja ini menjadi alat untuk mengonversi target jangka panjang dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah khususnya Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi program dan kegiatan yang lebih konkret, terukur, dan dapat dieksekusi dalam kurun waktu satu tahun.
2. Sebagai Panduan Kerja. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan utama bagi seluruh jajaran di Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kinerja. Dengan panduan yang jelas, potensi tumpang tindih atau disorientasi program dapat diminimalisasi.
3. Landasan Alokasi Anggaran. Renja ini menjadi dasar dalam pengajuan dan alokasi anggaran tahunan, memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan dialokasikan untuk program yang memiliki prioritas tinggi dan memberikan dampak maksimal.

Penyusunan Renja Biro Organisasi Tahun 2025 memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Organisasi. Renja ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melaksanakan program-program yang dapat memperkuat struktur, tata kelola, dan sistem kerja internal pemerintahan. Ini termasuk perbaikan pada sistem kepegawaian, pengembangan budaya kerja, serta peningkatan layanan administrasi.
2. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Prima. Dengan perbaikan tata kelola dan birokrasi, Renja ini secara tidak langsung bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Hal ini akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.
3. Sinkronisasi Program. Renja ini bertujuan untuk menyinkronkan program Biro Organisasi dengan rencana kerja unit-unit kerja lain di lingkungan pemerintah daerah. Sinkronisasi ini penting untuk menciptakan sinergi dan kolaborasi, menghindari duplikasi, serta memastikan semua pihak bekerja menuju tujuan yang sama.
4. Menjadi Instrumen Pengendalian dan Evaluasi. Dokumen ini berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun. Dengan adanya indikator kinerja yang jelas, Biro Organisasi dapat mengukur pencapaian, mengidentifikasi kendala, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan secara cepat.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

- Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun lalu
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisa Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- Bab III Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
- 3.1 Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan
 - 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional
 - 3.3 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.4 Program dan Kegiatan
- Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 telah dievaluasi untuk mengukur sejauh mana target yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada capaian kuantitatif, tetapi juga menganalisis kendala dan tantangan yang dihadapi. Hasil evaluasi ini menjadi dasar penting untuk menyusun program kerja yang lebih efektif pada tahun 2025.

Berdasarkan laporan akhir tahun, tingkat realisasi fisik program dan kegiatan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 mencapai 100%, sementara tingkat realisasi keuangan berada di angka 93,61%. Capaian ini menunjukkan kinerja yang solid dalam mengimplementasikan program-program yang telah direncanakan, Rincian Realisasi Program dan kegiatan Tahun 2024 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi			SILPA	
			Keuangan		Fisik %	(Rp.)	(%)
			(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1,668,609,790	1,627,153,070	97.52%	100%	41,456,720	2.48%
I.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,000,000	8,790,000	73.25%	100%	3,210,000	26.75%
1	Sub-Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12,000,000	8,790,000	73.25%	100%	3,210,000	26.75%
II.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	160,400,000	148,290,000	92.45%	100%	12,110,000	7.55%
2	Sub-Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	160,400,000	148,290,000	92.45%	100%	12,110,000	7.55%
III.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	227,000,000	217,535,459	95.83%	100%	9,464,541	4.17%
3	Sub-Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	21,000,000	20,847,000	99.27%	100%	153,000	0.73%
4	Sub-Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100,000,000	98,057,459	98.06%	100%	1,942,541	1.94%
5	Sub-Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	85,000,000	81,931,000	96.39%	100%	3,069,000	3.61%
6	Sub-Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21,000,000	16,700,000	79.52%	100%	4,300,000	20.48%

No.	Program/Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Penyediaan Dana	Realisasi			SILPA	
			Keuangan		Fisik %	(Rp.)	(%)
			(Rp.)	%			
1	2	3	4	5	6	7	8
IV.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	602,549,790	588,376,611	97.65%	100%	14,173,179	2.35%
7	Sub-Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100,000,000	99,771,700	99.77%	100%	228,300	0.23%
8	Sub-Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502,549,790	488,604,911	97.23%	100%	13,944,879	2.77%
V.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170,000,000	169,600,000	99.76%	100%	400,000	0.24%
9	Sub-Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	170,000,000	169,600,000	99.76%	100%	400,000	0.24%
VI.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	431,660,000	431,384,000	99.94%	100%	276,000	0.06%
10	Sub-Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	431,660,000	431,384,000	99.94%	100%	276,000	0.06%
VII.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,000,000	63,177,000	97.20%	100%	1,823,000	2.80%
11	Sub-Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	40,000,000	40,000,000	100.00%	100%	-	0.00%
12	Sub-Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25,000,000	23,177,000	92.71%	100%	1,823,000	7.29%
B.	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1,081,860,000	947,527,058	91.26%	100%	134,332,942	12.42%
VIII.	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	330,000,000	300,665,357	91.24%	100%	29,334,643	8.89%
13	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	80,000,000	78,565,094	98.21%	100%	1,434,906	1.79%
14	Sub-Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	80,000,000	67,781,466	84.73%	100%	12,218,534	15.27%
15	Sub-Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	170,000,000	154,318,797	90.78%	100%	15,681,203	9.22%
IX.	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	751,860,000	646,861,701	91.28%	100%	104,998,299	13.97%
16	Sub-Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	110,000,000	101,669,313	92.43%	100%	8,330,687	7.57%
17	Sub-Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	321,860,000	236,178,141	73.38%	100%	85,681,859	26.62%
18	Sub-Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	100,000,000	98,932,580	98.93%	100%	1,067,420	1.07%
19	Sub-Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	120,000,000	110,639,876	92.20%	100%	9,360,124	7.80%
20	Sub-Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	100,000,000	99,441,791	99.44%	100%	558,209	0.56%
	Total	2,750,469,790	2,574,680,128	93.61%	100%	175,789,662	6.39%

2.2. Analisa Kerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, kinerja pelayanan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024 menunjukkan arah positif menuju birokrasi yang lebih modern, efisien, dan berorientasi pada hasil. Keberhasilan yang telah dicapai menjadi modal penting, sementara tantangan yang dihadapi akan menjadi fokus perbaikan untuk tahun 2025. Pergeseran anggaran dan program kerja akan difokuskan untuk mengatasi kendala tersebut, memastikan Biro Organisasi tetap menjadi pilar utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif.

2.3. Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sepanjang tahun 2024, Biro Organisasi menghadapi sejumlah isu penting yang sangat memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya. Isu-isu ini tidak hanya bersifat internal, tetapi juga berkaitan dengan dinamika eksternal, seperti tuntutan masyarakat dan perubahan regulasi. Analisis terhadap isu-isu ini menjadi kunci untuk merumuskan strategi dan program kerja yang lebih responsif di masa depan.

Isu Utama dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1. Transformasi Digital Birokrasi. Isu paling mendesak adalah kebutuhan untuk mengintegrasikan dan mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan.
2. Dinamika Regulasi dan Kelembagaan. Perubahan kebijakan pemerintah pusat, terutama terkait penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan, menuntut Biro Organisasi untuk bergerak cepat dalam melakukan penyesuaian regulasi di tingkat daerah. Proses analisis dan evaluasi kelembagaan yang berkelanjutan menjadi vital untuk memastikan struktur organisasi tetap ramping dan efektif, tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.
3. Penguatan Budaya Kerja Berorientasi Kinerja. Birokrasi sering kali dihadapkan pada tantangan untuk bergeser dari budaya kerja yang berfokus pada prosedur menjadi budaya yang berorientasi pada hasil (kinerja). Isu ini meliputi penataan sistem manajemen kinerja yang lebih terukur, objektif, dan transparan, serta sosialisasi yang

pasif untuk menanamkan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas dan efektivitas kerja.

4. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM). meskipun program pelatihan telah dilaksanakan, masih terdapat keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi spesifik di bidang analisis kebijakan, tata kelola digital, dan reformasi birokrasi. Isu ini diperparah dengan tingginya beban kerja, sehingga optimalisasi SDM yang ada menjadi sangat krusial.
5. Sinkronisasi dan Koordinasi Lintas Sektor. Sebagai lembaga yang mengurus tata kelola, Biro Organisasi menghadapi isu koordinasi dengan perangkat daerah lain. Seringkali, terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya sinergi dalam program kerja yang seharusnya terintegrasi, seperti penataan kelembagaan atau evaluasi kinerja. Isu ini menghambat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan yang cepat dan terarah.

Dengan memahami isu-isu krusial ini, Biro Organisasi dapat merancang strategi yang lebih tepat guna, seperti investasi pada teknologi, pengembangan SDM, dan penguatan kerangka regulasi internal.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 telah kami kaji secara mendalam untuk memastikan keselarasan, efektivitas, dan sinkronisasi dengan arah kebijakan nasional dan daerah. Review ini menjadi langkah krusial untuk memastikan setiap program yang diusulkan benar-benar mendukung visi, misi, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Secara umum, Rancangan Awal RKPD 2024 menunjukkan komitmen kuat dalam melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Namun, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian serius seperti Sinkronisasi Program dengan Isu Strategis Daerah, Efektivitas dan Efisiensi Anggaran serta Penguatan Aspek Kelembagaan dan Tata Laksana

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Visi dan Misi Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan didasarkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Visi dan Misi ini merupakan komitmen strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Visi

"Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang Berintegritas, Profesional, dan Berorientasi Pelayanan Publik."

Visi ini mencerminkan cita-cita tertinggi Biro Organisasi untuk menjadi pilar utama dalam membangun birokrasi yang modern. Integritas menjadi landasan moral dalam setiap pengambilan keputusan. Profesionalisme memastikan setiap tugas dilaksanakan dengan kompetensi tinggi dan terukur. Sementara itu, berorientasi pelayanan publik menegaskan bahwa tujuan akhir dari seluruh kinerja birokrasi adalah untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Misi

Untuk mencapai Visi tersebut, Biro Organisasi merumuskan Misi yang terbagi dalam beberapa poin strategis:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Misi ini berfokus pada penataan kelembagaan, analisis jabatan, dan evaluasi kinerja organisasi secara berkala. Tujuannya adalah untuk menciptakan struktur birokrasi yang ramping, responsif, dan mampu bekerja secara optimal.

2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.

Melalui misi ini, Biro Organisasi berkomitmen untuk memfasilitasi dan mengawasi implementasi program-program reformasi birokrasi. Hal ini mencakup penyederhanaan prosedur, digitalisasi layanan, dan peningkatan transparansi.

3. Mengembangkan Sumber Daya Aparatur yang Kompeten dan Berbudaya Kinerja.

Misi ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas pegawai. Biro Organisasi akan menyelenggarakan program-program pelatihan yang relevan, mendorong inovasi, serta menanamkan budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian target dan hasil.

4. Membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang Terpadu dan Berkelanjutan.

Biro Organisasi akan menjadi garda terdepan dalam memastikan setiap perangkat daerah menyusun perencanaan, melaksanakan, dan melaporkan kinerja dengan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap program dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3.2. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Pembangunan Nasional

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025, Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan telaahan mendalam terhadap kebijakan dan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Telaahan ini bertujuan untuk memastikan setiap program kerja yang disusun selaras dan mendukung agenda nasional, sehingga terjadi sinergi yang optimal antara pemerintah pusat dan daerah.

a. Keselarasan dengan Kebijakan Nasional

1. Reformasi Birokrasi dan Kelembagaan

Kebijakan nasional menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu prioritas utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Biro Organisasi merespons kebijakan ini dengan memprioritaskan program yang berfokus pada:

- Penyederhanaan birokrasi

Mengurangi alur prosedur yang berbelit-belit dan melakukan penataan kelembagaan untuk menciptakan struktur yang lebih ramping dan efisien.

- Sistem kerja berbasis digital

Mendorong penggunaan aplikasi dan sistem informasi terpadu untuk pelayanan internal dan eksternal.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur

Pemerintah pusat menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang adaptif terhadap perubahan. Menindaklanjuti hal ini, Biro Organisasi mengintegrasikan program peningkatan kapasitas SDM dalam Renja 2025. Program ini meliputi:

- Pelatihan dan sertifikasi untuk kompetensi teknis dan manajerial.
- Pengembangan sistem manajemen kinerja yang objektif dan berbasis data.

3. Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Kebijakan nasional mendorong implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang lebih terukur dan berorientasi hasil. Biro Organisasi akan mengambil peran sentral dalam memastikan seluruh perangkat daerah menyusun dan melaporkan kinerja secara akuntabel, serta memfasilitasi evaluasi SAKIP secara berkala.

b. Prioritas Pembangunan Nasional yang Relevan

Biro Organisasi juga mengkaji prioritas pembangunan nasional yang memiliki relevansi langsung dengan tugas dan fungsinya. Prioritas ini menjadi acuan dalam merumuskan program kerja:

- **Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi**

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, Biro Organisasi mendukung prioritas ini dengan memastikan tata kelola kelembagaan terkait perizinan dan investasi berjalan efisien. Proses birokrasi yang cepat akan mendorong iklim investasi yang lebih kondusif.

- **Penguatan Ketahanan Sosial dan Budaya**

Biro Organisasi berkontribusi melalui penataan kelembagaan yang berkaitan dengan urusan sosial dan budaya, serta memastikan SDM aparatur memiliki pemahaman yang baik tentang keberagaman dan etika pelayanan.

3.3. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dirancang untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien. Renja ini memiliki **tujuan utama** untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, lincah, dan responsif terhadap tuntutan publik serta dinamika perubahan global. Melalui serangkaian program dan kegiatan, Biro Organisasi berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan bahwa struktur serta fungsi kelembagaan pemerintah berjalan optimal.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Renja Biro Organisasi Tahun 2025 menetapkan **tiga sasaran strategis** yang saling terkait:

1. **Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Tata Laksana.**

Sasaran ini berfokus pada penyempurnaan struktur organisasi dan proses kerja di lingkungan pemerintahan. Melalui kajian dan analisis mendalam, Biro Organisasi akan mengidentifikasi area yang membutuhkan perampingan, reorganisasi, atau penyesuaian. Tujuannya adalah untuk menghilangkan duplikasi tugas, mempercepat alur kerja, dan memastikan setiap unit kerja memiliki peran yang jelas dan relevan.

2. **Penguatan Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.**

Sasaran ini bertujuan untuk memastikan setiap instansi pemerintah bertanggung jawab penuh atas kinerja dan pencapaiannya. Biro Organisasi akan memfasilitasi penerapan sistem akuntabilitas yang lebih ketat, transparan, dan terukur. Ini termasuk **penyusunan dan evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)**, serta mendorong penggunaan indikator kinerja utama (IKU) yang lebih spesifik dan realistis.

3. **Penguatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik.**

Sasaran ini adalah inti dari upaya modernisasi birokrasi. Biro Organisasi akan berperan aktif dalam mendorong dan mengawasi implementasi program reformasi birokrasi di berbagai tingkatan. Fokus utamanya adalah pada **penerapan sistem manajemen berbasis elektronik (e-government)**, penyederhanaan prosedur pelayanan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Sasaran ini juga mencakup upaya untuk membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil dan kepuasan publik.

3.4 Program dan Kegiatan

Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Tahun 2025 disusun untuk menerjemahkan sasaran strategis ke dalam aksi nyata melalui serangkaian program dan kegiatan yang terstruktur. Program-program ini dirancang untuk mencapai birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Program kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja (Renja) Tahun 2025 Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 5. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
 7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik

9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
 10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD
- V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
11. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
- VI. Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah.
14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya

B. Program Penataan Organisasi

- VIII. Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan
16. Sub Kegiatan Penataan Kelembagaan Provinsi
 17. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota
 18. Sub Kegiatan Analisis Jabatan
- IX. Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja.
19. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 20. Sub Kegiatan Monitoring Dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
 21. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja
 22. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan
 23. Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik

Pagu Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN										
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH				4,200,000,000				4,718,000,000		
A.	4.01.01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100%	2,725,000,000	APBD		100%	2,928,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik
I.	4.01.01.1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	35,000,000	APBD		100%	90,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.01.01	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	35,000,000	APBD		1 Dok.	90,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
II.	4.01.01.1.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	170,000,000	APBD		100%	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.02.02	2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	170,000,000	APBD		1 Dok.	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
III.	4.01.01.1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	300,000,000	APBD		100%	445,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.03	3. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	150,000,000	APBD		1 Dok.	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.04	4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	50,000,000	APBD		1 Dok.	50,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.05	5. Sub-Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	50,000,000	APBD		1 Dok.	50,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja /Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	4.01.01.1.05.09	6. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kantor Perangkat Daerah	5 Orang	40,000,000	APBD		5 Orang	130,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.05.11	7. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Kantor Perangkat Daerah	3 Orang	10,000,000	APBD		3 Orang	15,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
IV.	4.01.01.1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	633,000,000	APBD		100%	900,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.06.04	8. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	2 Paket	130,000,000	APBD		2 Paket	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.06.09	9. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	453,000,000	APBD		1 Laporan	650,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.06.11	10. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kantor Perangkat Daerah	1 Dok.	50,000,000	APBD		1 Dok.	50,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
V.	4.01.01.1.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	950,394,000	APBD		100%	390,373,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.07.02	11. Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	3 Mobil (R4)	870,394,000	APBD		6 Motor (R2)	190,373,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.07.10	12. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	10 Unit	80,000,000	APBD		10 Unit	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
VI.	4.01.01.1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	471,606,000	APBD		100%	617,627,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.08.04	13. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	471,606,000	APBD		1 Laporan	617,627,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik

No.	Kode Rekening	Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 900-1317)	Indikator Kinerja / Program/ Kegiatan/Sub- Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Cat. Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026		Kegiatan Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Nasional
		Bidang Urusan/Program/Kegiatan /Sub-Kegiatan		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VII.	4.01.01.1.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kantor Perangkat Daerah	100%	165,000,000	APBD		100%	285,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.09.08	14. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang dipelihara	Kantor Perangkat Daerah	5 Unit	120,000,000	APBD		5 Unit	180,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.01.1.09.09	15. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kantor Perangkat Daerah	1 Unit	45,000,000	APBD		1 Unit	105,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
B.	4.01.02	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Indeks Kinerja Organisasi		7.19	1,475,000,000	APBD		100%	1,790,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik	Transformasi Pelayanan Publik
VIII.	4.01.02.1.01	Kegiatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Persentase Peningkatan Fasilitas Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kantor Perangkat Daerah	100%	520,000,000	APBD		100%	720,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.01.01	16. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Provinsi	dlm daerah, luar Daerah	1 dok	135,000,000	APBD		1 dok	250,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.01.02	17. Sub Kegiatan Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penataan Kelembagaan Kab./Kota	dalam daerah	1 dok	135,000,000	APBD		1 dok	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.01.03	18. Sub Kegiatan Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan	Kantor Perangkat Daerah	2 dok	250,000,000	APBD		2 dok	270,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
IX.	4.01.02.1.02	Kegiatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Persentase Peningkatan Fasilitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Kantor Perangkat Daerah	100%	955,000,000	APBD		100%	1,070,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.01	19. Sub Kegiatan Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	225,000,000	APBD		1 dok	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.02	20. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dalam Daerah, Luar Daerah	2 dok	270,000,000	APBD		2 dok	300,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.03	21. Sub Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Budaya Kerja	Kantor Perangkat Daerah	1 Laporan	140,000,000	APBD		1 Laporan	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.04	22. Sub Kegiatan Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	170,000,000	APBD		1 dok	200,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
	4.01.02.1.02.05	23. Sub Kegiatan Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peningkatan Pelayanan Publik	Dalam Daerah, Luar Daerah	1 dok	150,000,000	APBD		1 dok	170,000,000	Peningkatan Jenis Pelayanan Publik yang Efisien	Transformasi Pelayanan Publik
Jumlah						4,200,000,000				4,718,000,000		

Rencana Kerja 2025

Biro Organisasi Setda Prov. Sumsel

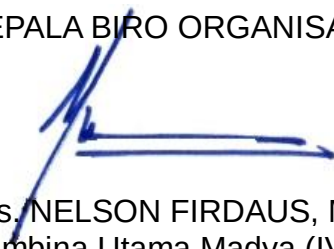
BAB IV PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 ini merupakan wujud nyata dari komitmen kami untuk terus berinovasi dan beradaptasi. Dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan peta jalan yang akan memandu setiap langkah kita menuju birokrasi yang lebih modern, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Seluruh program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja ini, mulai dari penataan kelembagaan, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga implementasi reformasi birokrasi, adalah upaya bersama untuk memastikan bahwa Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai motor penggerak perubahan positif.

Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi tinggi, kita optimis dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Renja 2025 ini adalah langkah awal yang solid untuk menciptakan birokrasi yang lincah, profesional, dan mampu menjawab setiap tantangan di masa depan, demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Palembang,
KEPALA BIRO ORGANISASI,



Drs. NELSON FIRDAUS, MM
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP.196710161988101001